

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	5
2.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	5
2.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.....	6
2.2.1. Sarana dan Prasarana.....	6
2.2.2. Sumberdaya Manusia.....	7
2.2.3. Anggaran Pelayanan Informasi.....	8
2.3. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	8
2.3.1. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
2.3.2. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
2.4. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9
BAB III. PENUTUP	10

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi publik merupakan kewajiban bagi semua Badan Publik. Hal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Badan Publik berkewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Bantul dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan

dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II. MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Informasi merupakan salah satu hal utama dalam era demokrasi. Kebebasan individu untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan pada hakekatnya merupakan hak asasi manusia. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

perkembangan teknologi dan informasi serta pergeseran pola masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi harus diikuti dengan penyesuaian dan perubahan kebijakan yang sebelumnya berada dalam sistem di luar jaringan ke sistem dalam jaringan sehingga mempermudah masyarakat mendapatkan hak informasinya.

2.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan peraturan bupati bantul nomor 42 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah kabupaten bantul, badan penanggulangan bencana sebagai PPID pembantu di lingkup pemerintah daerah kabupaten bantul mempunyai tugas: (1). Membantu PPID utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; (2). Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; (2). Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (3). Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; (4). Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan (5). Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.



2.2.1. Sarana dan Prasarana

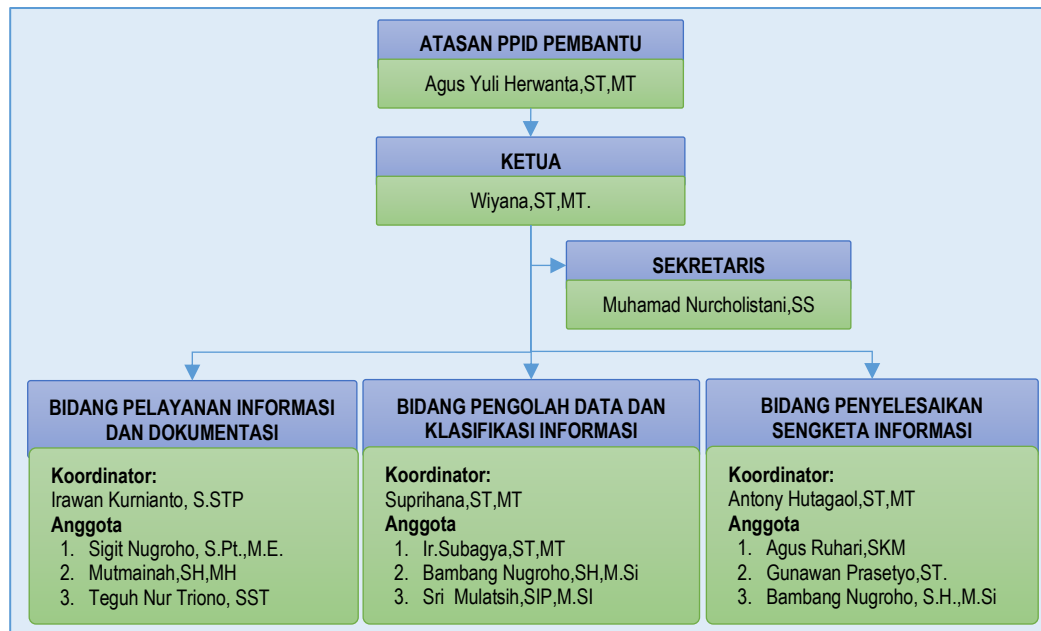
Dalam melaksanakan ketugasan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

- a. Meja layanan tamu
- b. Ruang layanan informasi
- c. Papan informasi
- d. Media sosial melalui kanal youtube, facebook, twitter, instagram

e. Website

2.2.2. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen dan teknis kegiatan di suatu organisasi. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh tim PPID yang strukturnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Ketugasan tim PPID adalah sebagai berikut:

a. Ketua PPID

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. Sekretaris PPID

Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID

c. Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi

Memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

d. Bidang pengolah data dan klasifikasi informasi

Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

e. Bidang penyelesaian sengketa informasi

Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

2.2.3. Anggaran Pelayanan Informasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak menganggarkan secara khusus dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2022. Pelayanan informasi publik dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang sudah ada.

2.3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Rincian pelayanan informasi publik tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah permohonan informasi sejumlah 35 permohonan dengan kriteria pemohon didominasi oleh kalangan mahasiswa sebesar 62,86% dan sisanya dari instansi/lembaga sebesar 37,14%.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada tahun 2022 adalah 1,71 hari. Rincian waktu pemenuhan informasi tergantung pada jenis data yang diinginkan oleh pemohon.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sejumlah 35 permohonan.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sejumlah 0 permohonan yang disebabkan tidak tersedianya data di BPBD dan diarahkan ke instansi lain yang mempunyai kewenangan sesuai bidang permohonan informasi.

Detail pelayanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

2.3.1. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pada tahun 2022 tidak terdapat sengketa informasi publik.

2.3.2. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

- a. Jenis dan tipe data/informasi yang disampaikan oleh pemohon kurang jelas.

Kendala internal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

- a. Prasarana dan sarana pelayanan informasi masih kurang memadai.
- b. Kualitas pelayanan di *front desk* masih perlu ditingkatkan
- c. Kecepatan respon terkait permohonan informasi masih perlu ditingkatkan.

2.4. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan informasi
- b. Peningkatan kualitas SDM khususnya di *front desk*

BAB III. PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 secara umum sudah termasuk baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama dalam sisi kualitas pelayanan kepada permohon informasi.

Laporan ini merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan ditampilkan dalam web PPID.

Bantul, 10 Februari 2023
Kepala Pelaksana



Agus Yuli Herwanta,ST,MT
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19630414 199103 1 006

**DAFTAR PEMOHON INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022**

No.	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Alasan Penolakan	Waktu/Hari
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard file	Soft file		
1	04-Jan-22	05-Jan-22		IPDN		Mahasiswa	Data Kebencanaan	Penelitian TA	v			v	v			2
2	03-Feb-22	04-Feb-22		Polres Bantul			Data terkait proyek / pekerjaan TA 2021 dan 2022		v			v	v			2
3	14-Feb-22	15-Feb-22		UMY		Mahasiswa	Kuisisioner		v		v		v			2
4	16-Feb-22	16-Feb-22		ITNY		Mahasiswa	Data Bencana	Penelitian TA	v		v		v			1
5	01-Mar-22	01-Mar-22		UGM		Mahasiswa	Questioner pengaruh disiplin kerja motivasi kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan	Penelitian TA	v		v		v			1
6	14-Mar-22	15-Mar-22		UPN		Mahasiswa	Permintaan data kesiapan alat/perlengkapan bencana alam		v			v	v			2
7	17-Mar-22	17-Mar-22		UMY		Mahasiswa	Kuisisioner	Penelitian TA	v			v	v			1
8	31-Mar-22	31-Mar-22		Yogyakarta			Data Sekunder		v			v	v			1
9	05-Apr-22	05-Apr-22		UAD		Mahasiswa	Kuisisioner	Penelitian TA	v		v		v			1
10	13-Apr-22	13-Apr-22		UMY		Mahasiswa	Data kejadian tahun 2020 di kabupaten bantul	Penelitian TA	v			v	v			1
11	18-Apr-22	18-Apr-22		Bantul			Data Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Gempa		v			v	v			1
12	08-May-22	10-May-22		UPN		Mahasiswa	Permintaan data kesiapan alat/perlengkapan bencana alam	Penelitian TA	v			v	v			3
13	27-May-22	30-May-22		Univ Diponegoro		Mahasiswa	Permintaan data bencana alam	penelitian TA	v			v	v			4

No.	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Alasan Penolakan	Waktu/Hari
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard file	Soft file		
14	15-Jun-22	15-Jun-22					Permintaan Data Banjir, Kekeringan dan Tanah Longsor		v			v		v		1
15	16-Jun-22	16-Jun-22		DIY			Data RTR		v			v		v		1
16	17-Jun-22	27-Jun-22		BANTUL		Instansi	Data ASN yang belum memperoleh vaksin booster	Evaluasi	v			v		v		11
17	20-Jun-22	20-Jun-22		Univ Jember		Mahasiswa	Data Penelitian	TA	v		v			v		1
18	22-Jun-22	22-Jun-22		BANTUL		Instansi	Data center pemkab bantul	Persiapan dan pengelolaan ISO 27001	v			v		v		1
19	04-Jul-22	04-Jul-22		DIY		Instansi	Data banjir dan kekeringan selama 5 tahun	Evaluasi	v			v		v		1
20	04-Jul-22	04-Jul-22		UNY		Mahasiswa	Data Penelitian	TA	v		v			v		1
21	11-Jul-22	11-Jul-22		BANTUL		Instansi	Data peta ancaman bencana	Evaluasi	v			v		v		1
22	25-Jul-22	25-Jul-22		BANTUL		Instansi	Permohonan Data Capaian SDG'S		v			v		v		1
23	15-Aug-22	15-Aug-22		BANTUL		Instansi	Data kebencanaan	Melengkapi ritek penyimpanan limbah B3								1
24	14-Sep-22	14-Sep-22		Yogyakarta		Mahasiswa	Data Daerah Rawan Bencana	Penelitian TA	v			v		v		1
25	14-Sep-22	15-Sep-22		BANTUL		Instansi	Data Rencana Penanggulangan Bencana		v			v		v		2
26	29-Sep-22	30-Sep-22		STIKES		Mahasiswa	Permintaan Data	Penelitian TA	v			v		v		2
27	06-Oct-22	06-Oct-22		Yogyakarta			Informasi Data Riwayat Bencana		v			v		v		1
28	14-Oct-22	15-Oct-22		Yogyakarta		Mahasiswa	Kuisisioner	Penelitian TA	v		v		v			2
29	18-Oct-22	19-Oct-22		UGM		Mahasiswa	Data Kebencanaan	Penelitian TA	v			v		v		2
30	05-Dec-22	05-Dec-22		UGM		Mahasiswa	Permintaan Data	Penelitian TA	v			v		v		1

No.	Tanggal		Nama	Alamat	Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Cara Memperoleh Informasi		Bentuk Informasi		Alasan Penolakan	Waktu/Hari
	Terima	Ditanggapi							Ada	Tidak	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan	Hard file	Soft file		
31	08-Dec-22	09-Dec-22		Yogyakarta		Mahasiswa	Permintaan Data	Penelitian TA	v			v		v		2
32	13-Dec-22	13-Dec-22		UMY		Mahasiswa	Permintaan Data dan Wawancara	Penelitian TA	v			v		v		1
33	19-Dec-22	19-Dec-22		UTY		Mahasiswa	Data Kebencanaan	Penelitian TA	v			v		v		1
34	27-Dec-22	27-Dec-22		DIY		Instansi	Permohonan Data Bencana Setiap Bulan		v			v		v		1
35	29-Dec-22	30-Dec-22		DIY		Instansi	Data Kebencanaan		v			v		v		2

Keterangan: Nama dan Nomor Kontak tidak dipublikasikan